



**LEMBARA DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Nomor : 23

TAHUN : 1985

SERIE "D" No. 23

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 10 TAHUN 1983**

T E N T A N G

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pembangunan secara berkesinambungan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang merupakan landasan Repelita IV Daerah, agar dapat mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun mendatang untuk mencapai tujuan pembangunan nasional jangka panjang.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara ;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974

tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja BAP-PEDA.
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Nopember 1978 No. Bangda 1/9/26 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

Pasal 1

- (1). Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh disusun dalam rangka meningkatkan pembangunan secara berkesinambungan yang merupakan landasan dari pada Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah.
- (2). Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh dan berkesinambungan, maka sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh disusun sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN ;
 - b. BAB II POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG ;
 - c. BAB III POLA UMUM REPELITA IV DAERAH ;
 - d. BAB IV P E N U T U P.

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini terdapat dalam naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Program pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan serta usaha-usaha pembangunan akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Tahun IV Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

BANDA ACEH, 10 Oktober 1983

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH IS-
TIMEWA ACEH,
K E T U A,**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMEWA ACEH,**

H. ACHMAD AMINS

H. HADI THAJEB

**Diundangkan dalam Lembaran Da-
erah Propinsi Daerah Istimewa
Aceh -----**

Nomor 23 Tahun 1985

Tanggal 12 April 1985 SERIE "D"

Nomor : 23

**Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh
Menteri Dalam Negeri dengan Surat Ke-
putusan :**

Nomor : 05021-288

Tanggal 2 April 1985.

Sekretaris Wilayah/Daerah

ASNAWI HASJMY, SH

Nip. 390003081.—

B A B I

PENDAHULUAN

A. PENGERTIAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh adalah suatu Pola Umum Pembangunan Daerah, yang merupakan garis-garis besar kebijaksanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pola Umum Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan rangkaian program-program pembangunan daerah, yang menyeluruh, terarah dan terpadu serta berlangsung terus menerus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Nasional.

"Disamping itu Pola Umum ini adalah penjabaran lebih lanjut dari Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan merupakan aspirasi rakyat."

Rangkaian program-program pembangunan yang terus menerus itu dimaksudkan untuk mewujudkan Tujuan Nasional seperti termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tanah Tumpah Darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penetapan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh bermaksud untuk memberi arah dan pedoman terhadap usaha pembangunan daerah yang sedang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Tujuannya adalah agar dapat mewujudkan keadilan yang diinginkan dalam jangka waktu lima tahun berikutnya dan dalam jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat terwujudnya cita-cita rakyat di Propinsi Daerah Istimewa Aceh khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, seperti termaktub dalam Undang Undang Dasar 1945.

C. POKOK - POKOK PENYUSUNAN POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Daerah Istimewa Aceh mempunyai asas-asas yang sama dengan asas-asas Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, yaitu : asas manfaat, asas usaha bersama dan kekeluargaan, asas demokrasi, asas adil dan merata, asas perikehidupan dalam keseimbangan, asas kesadaran hukum, asas kepercayaan pada diri sendiri.

Pola Dasar Pembangunan Daerah disusun untuk memberikan gambaran mengenai

wujud masa depan yang diinginkan baik dalam waktu lima tahun berikutnya, maupun dalam jangka panjang, dengan sistematika sebagai berikut :

1. POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG
2. POLA UMUM PEMBANGUNAN LIMA TAHUN IV DAERAH

www.jdih.acehprov.go.id

BAB II

POLA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG

A. PENDAHULUAN

Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang adalah Garis-garis Besar dan arah Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 25 – 30 tahun berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara dalam bidang pembangunan Daerah yang berisi pedoman pokok yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, agama dan kepercayaan. Pola ini akan menjadi panduan dasar bagi penyusunan rencana jangka menengah (lima tahun) dan rencana jangka pendek (tahunan) Daerah.

Dalam penyusunannya, Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang mempunyai sifat sebagai berikut :

1. Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang bersifat umum, yaitu memuat garis-garis besar yang berisi nilai-nilai strategis dalam pencapaian sasaran Pembangunan dalam jangka waktu 25 - 30 tahun.
2. Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang bersifat normatif, yaitu menetapkan usaha-usaha untuk mempengaruhi masa depan, sehingga terwujud suatu pembangunan yang bersifat dinamis dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya, baik secara spiritual maupun mental.
3. Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang memberikan arah bagi pencapaian tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam jangka 25 – 30 tahun.

Penyusunan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang di latar belakang oleh pengalaman masa lalu dan keinginan untuk mengejar ketinggalan serta hasrat untuk menikmati hasil-hasil pembangunan. Semua ini merupakan penjelasan dari aspirasi rakyat Aceh dalam wadah kesatuan bangsa, dengan kondisi awal yang dipunyai daerah.

Setelah cita-cita kemerdekaan Indonesia tercapai di tahun 1945, rakyat Aceh, bersama-sama dengan saudara-saudaranya di daerah lain, secara gigih ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pergolakan-pergolakan politik yang diikuti oleh peristiwa-peristiwa nasional lainnya, rakyat Aceh terus-menerus mengalami kegoncangan politik dan sosial, yang mengakibatkan terbatasnya kesempatan untuk melibatkan diri dalam usaha-usaha memperbaiki perekonomian serta menata kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Sesudah usaha pengambil alihan kekuasaan G 30 S/PKI dapat digagalkan pada tahun 1965, Pemerintah Orde Baru mulai tahun 1966 menciptakan stabilitas nasional. Dan semenjak itu rakyat Aceh secara bertahap berusaha melepaskan diri dari ketinggalan dan keterbelakangan daerah dengan memulai pembangunan di bidang ekonomi, sosial, politik dan keamanan. Penciptaan iklim politik

yang mantap yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 harus diisi dengan pembangunan yang berkesinambungan. Dasar-dasar berpikir yang rasional dan pragmatis yang disertai perencanaan yang terarah, dijabarkan dalam suatu Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dari segi kehidupan ekonomi, kenyataan menunjukkan bahwa Propinsi Daerah Istimewa Aceh memiliki potensi ekonomi yang relatif cukup banyak. Sumber gas alam yang banyak akan menumbuhkan berbagai industri dasar lainnya, seperti pupuk, petrokimia dan lain-lain.

Disamping itu Daerah Istimewa Aceh juga mempunyai produksi pertanian yang cukup beraneka ragam, baik produksi pertanian bahan makanan, seperti padi, palawija dan hortikultura, maupun produksi pertanian perdagangan, seperti karet, kopi, cengkeh, pala, nilam dan lain-lain. Selain itu Daerah ini juga menghasilkan hasil-hasil hutan lain, seperti kayu dan damar.

Pengefektifan sumber-sumber yang potensial tersebut akan membuka kesempatan yang cukup luas untuk pembangunan, baik untuk pembangunan daerah, maupun pembangunan nasional.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh disusun berdasarkan :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan konstitusional : UUD 1945 ;
3. Landasan Operasional : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. : II/MPR/1983 tentang GBHN khususnya mengenai pembangunan daerah.

B. KONDISI DAN POTENSI WILAYAH

Propinsi Daerah Istimewa Aceh terletak di ujung barat laut pulau Sumatera antara $2^{\circ} - 6^{\circ}$ lintas utara dan $95^{\circ} - 98^{\circ}$ bujur timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Sumatera.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Daerah Tingkat I Sumatera Utara
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Sumatera.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Luas Daerah Istimewa Aceh adalah 5.539.000 ha dengan perincian penggunaan tanah seperti tercantum dalam tabel - I.

TABEL -- I
PENGUNAAN TANAH DI DAERAH ISTIMEWA ACEH

No.	Penggunaan Tanah	Luas Areal	Persentase (%)
1.	Kawaasn hutan	± 3.282.260 Ha	(59,25 %)
2.	Pertanian Pangan/ Tegalan	± 360.000 Ha	(6,5 %)
3.	Perkebunan besar/ perk. Rakyat	± 646.740 Ha	(11,6 %)
4.	Perikanan	± 50.000 Ha	(1 %)
5.	Padang Pengembalaan Temak	± 450.000 Ha	(8,12%)
6.	Perkotaan dan Pemu- kiman/Transmigrasi	± 350.000 Ha	(6,3 %)
7.	Danau dan Sungai	± 360.000 Ha	(6,5 %)
8.	Lain-lain (cadangan)	± 40.000 Ha	(3,62 %)

Daerah ini mempunyai iklim tropis. Rata-rata curah hujan tiap tahun adalah 2.280 mm dengan rata-rata jumlah hari hujan setahun adalah 156 hari. Pantai barat dan selatan memiliki hari dan curah hujan per tahun relatif banyak dibandingkan dengan pantai utara dan timur. Di daerah ini terdapat hutan-hutan yang lebat. Musim kemarau biasanya jatuh pada bulan Februari sampai bulan Agustus, sedangkan musim hujan pada bulan September sampai dengan bulan Januari.

Daerah Istimewa Aceh terdiri dari 8 Kabupaten, 2 Kotamadya, 133 Kecamatan, dan 5.461 gampong, dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 1981 sebanyak 2.637.458 jiwa. Distribusi penduduk tidak merata antara wilayah-wilayah, yakni 66,05% berada di wilayah pantai utara dan timur dengan luas wilayah adalah 34,61%, sedangkan 21,6% penduduk mendiami wilayah barat dan selatan yang luas wilayahnya adalah 37,93%, dan 12,35% berdiam di wilayah tengah dengan areal seluas 27,46% Tingkat pertumbuhan rata-rata adalah 2,93 % setahun. Kepadatan penduduk relatif jarang yaitu 49 jiwa per Km persegi. Komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan 50% lebih berada dalam usia muda. Keadaan ini merupakan suatu tantangan dalam penyediaan kesempatan kerja di masa mendatang. Sebagian besar penduduk (75,7%) masih hidup di sektor pertanian yang masih

tradisional.

Perincian distribusi penduduk menurut kabupaten dan Kotamadya dapat dilihat dalam tabel 2

www.jdih.acehprov.go.id

TABEL - 2

DISTRIBUSI PENDUDUK MENURUT KABUPATEN KODYA,
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, TAHUN 1971 DAN 1980

NO. :	WILAYAH PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTAMADYA	LUAS WILAYAH		1971		1980	
		Km2	%	PENDUDUK	%	PENDUDUK	%
A.	WILAYAH PEMBANGUNAN-I	21.010	37,9	457.581	22,81	565.106	21,60
1.	Aceh Barat	12.100	21,8	223.889	11,18	289.246	11,06
2.	Aceh Selatan	8.910	16,1	233.692	11,63	275.860	10,54
B	WILAYAH PEMBANGUNAN-II	6.655	12,0	543.192	27,04	653.476	25,90
3.	Kodya Sabang	200	0,4	17.201	0,86	23.821	0,91
4.	Kodya Banda Aceh	11	0,10	53.626	2,67	72.714	2,78
5.	Aceh Besar	3.029	5,5	181.339	9,03	236.417	9,04
6.	Pidie	3.415	6,1	291.026	14,48	344.345	13,17
C.	WILAYAH PEMBANGUNAN-III	12.515	22,6	776.221	38,62	1050.466	40,16
7.	Aceh Utara	4.755	8,6	471.589	23,46	626.014	23,93
8.	Aceh Timur	7.760	14,0	304.632	15,16	424.452	16,23
D.	WILAYAH PEMBANGUNAN-IV	15.210	27,5	232.803	11,58	322.714	12,34
9.	Aceh Tengah	5.575	10,1	108.752	5,41	163.464	6,25
10.	Aceh Tenggara	9.635	17,4	124.051	6,17	159.250	6,09
JUMLAH		55.390	100,00	2.009.747	100,0	2.615.583	100,0

Sumber : BAPPEDA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Propinsi Daerah Istimewa Aceh mempunyai potensi sumber alam yang cukup banyak, baik sumber bahan galian, sumber hutan maupun sumber lautan. Areal hutan merupakan sumber yang sangat potensial untuk produksi kayu. Sebagian hutan tropis yang terdapat di daerah ini masih mungkin dikonversikan untuk areal pertanian.

Lahan yang telah dimanfaatkan untuk pertanian dan padang alang-alang untuk pengembalaan merupakan sumber potensial untuk makanan ternak, walaupun masih mempunyai daya tampung (carrying capacity) yang relatif rendah. Sumber air bagi penunjang pertanian mempunyai potensi yang cukup besar, dengan sungai-sungai yang bermuara ke pantai barat, timur dan utara. Sungai-sungai tersebut telah membentuk 12 DAS (Daerah Aliran Sungai), 7 DAS bermuara ke utara dan timur dan 6 DAS lainnya bermuara ke pantai barat. DAS tersebut adalah Kr. Aceh, Kr. Baro, Kr. Meureudu, Kr. Peusangan, Kr. Pase, Kr. Jambo Aye, Kr. Peureulak, Kr. Singkil, Kr. Kluet, Kr. Tripa, Kr. Merbau, Kr. Teunom/Woyla dan Kr. Sabee.

Sumbangan sektor-sektor ekonomi (tanpa minyak dan gas) dalam produk domestik bruto regional (PDBR) Aceh pada harga konstan 1975 menurut lapangan usaha masih didominasi oleh sektor pertanian (56%) yang diikuti oleh sektor pemerintahan dan pertahanan (14%) dan sektor perdagangan (13%). Sektor pertanian memegang peranan cukup besar, tetapi tingkat pertumbuhannya relatif rendah. Ini disebabkan oleh kualitas tenaga kerja yang masih rendah dan penggunaan teknologi masih bersahaja. Tabel 3 memperlihatkan porsi dari pada masing-masing sektor dalam produk domestik regional bruto.

TABEL --3

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAERAH ISTIMEWA
ACEH MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 1980**

(Dalam Rp. Juta)

No.	Lapangan Usaha	Harga-harga Yang berla- ku 1980	Persen- tase %	Harga Kon- stan 1975	Persen- tase %
1.	Pertanian, Peternakan, Ketunan dan Perikan- an.	287.018,59	61,96	121.547,46	56,36
2.	Industri	21.357,17	4,61	16.476,55	7,64
3.	Bangunan	22.615,90	4,89	7.986,66	3,70
4.	Listrik dan Air Minum	699,70	0,15	452,95	0,21
5.	Pengangkutan dan Ko- munikasi.	10.805,59	2,33	7.519,18	3,48
6.	Perdagangan besar dan eceran.	56.732,55	12,25	27.890,62	12,94
7.	Bank dan Lembaga- Lembaga Keuangan lainnya.	1.782,12	0,38	806,12	0,38
8.	Sewa Rumah	7.683,67	1,66	2.247,10	1,04
9.	Pemerintahan dan Per- tanian.	52.385,44	11,31	29.592,96	13,73
10.	Jasa-jasa	2.153,48	0,46	1.130,52	0,57
Produksi Domistik Regional Bruto		463.234,21	100,00	215.650,12	100,00

Sumber : Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Perkembangan ekspor selama Pelita III (termasuk gas dan minyak bumi) rata-rata per tahun sebesar US \$ 1.865.248.727. Komoditi yang memegang peranan terbesar dalam nilai ekspor daerah ini ialah gas alam cair dan condensate (95 %), sedangkan komoditi non migas relatif kecil. Komoditi-komoditi yang mungkin

dikembangkan adalah karet, kelapa sawit, kopi, kayu dan udang. Kegiatan ekspor selama beberapa tahun terakhir ini relatif menurun, baik volume maupun nilainya. Ini tidak hanya disebabkan oleh resesi ekonomi dunia tetapi juga oleh kelemahan prasarana dan sarana yang menunjang ekspor.

Prasarana perhubungan darat terutama ruas jalan antara Banda Aceh dan perbatasan Propinsi Sumatera Utara serta Meulaboh dan Tapaktuan relatif baik, sedangkan ruas jalan lainnya masih dalam kondisi yang kurang baik. Prasarana produksi sudah relatif baik, sedangkan prasarana perhubungan laut terutama dipantai barat dan selatan berada dalam kondisi yang kurang baik. Prasarana telekomunikasi masih belum menjangkau semua daerah tingkat II.

Nilai-nilai budaya masyarakat tetap berkembang dan merupakan potensi yang konstruktif untuk menggerakkan pembangunan. Agama Islam yang dipeluk oleh masyarakat Aceh merupakan fondasi yang cukup kokoh sebagai wadah pembinaan mental untuk menerima hal-hal baru dan merupakan faktor yang paling utuh dalam akselerasi pembangunan daerah.

C. TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan daerah bertujuan untuk membangun masyarakat di daerah ini dengan segenap aspirasinya dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, agama dan keamanan dalam rangka menunjang pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur yang harmonis berdasarkan Pancasila. Pembangunan Daerah Jangka Panjang akan merupakan upaya dari masyarakat di daerah ini dalam rangka menjamin hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan lingkungannya, sehingga terdapat keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara cita-cita hidup di dunia serta kebahagiaan hidup di akhirat.

Pembangunan Daerah Jangka Panjang, bukan saja bertujuan mengurangi kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan lain-lain, tetapi juga bertujuan membangun masyarakat dalam bidang mental spiritual, sehingga pembangunan itu dapat mengenai sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat perkotaan.

D. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG.

1. U m u m

Pembangunan Daerah dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat di Daerah Istimewa Aceh dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Pembangunan Daerah Jangka Panjang dilaksanakan secara bertahap. Tujuan setiap tahap pembangunan adalah untuk

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat di Daerah Istimewa Aceh serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap-tahap pembangunan berikutnya.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah ditempuh kebijaksanaan pembangunan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional yaitu dengan berlandaskan pada trilogi pembangunan di mana tekanan yang lebih menonjol diberikan kepada segi pemerataan di samping pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabilitas yang sehat dan dinamis. Pembangunan Daerah Jangka Panjang diarahkan untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi rakyat Aceh agar tumbuh dan berkembang dalam wadah kesatuan bangsa dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan antara sektor pertanian dan industri dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.

Pembangunan Daerah Jangka Panjang harus mampu mengadakan transformasi struktural dalam bidang ekonomi. Transformasi struktural akan meningkatkan produktivitas di sektor pertanian dan sektor industri yang merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi di daerah ini. Pembangunan Daerah Jangka Panjang juga merupakan transformasi struktural dalam bidang sosial yang mencakup proses penyesuaian di semua perangkat kehidupan masyarakat. Transformasi dimaksud bertujuan untuk dapat menghantarkan masyarakat ke arah yang lebih dinamis, tanpa merubah nilai-nilai fundamental yang perlu dipelihara dalam menunjang pembangunan. Pengisian nilai-nilai keagamaan akan lebih dikembangkan sebagai suatu usaha peningkatan kekuatan mental spiritual dalam pembangunan Daerah.

Sumber daya alam dan sumber daya manusia dimanfaatkan secara rasional, efisien dan efektif dengan menggunakan teknologi maju dan atau tepat guna. Pemanfaatan sumber alam, tidak boleh mengakibatkan kerusakan lingkungan, yang akan membawa kerugian kepada kehidupan generasi mendatang.

Perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi merupakan penunjang bagi usaha peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam jangka panjang pembangunan daerah harus dibarengi dengan pemerintahan yang cukup kuat, stabil, bersih dan berwibawa. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial budaya serta menciptakan suasana yang lebih baik bagi perkembangan dunia usaha.

Pembangunan Daerah Jangka Panjang memerlukan partisipasi masyarakat secara aktif, bukan saja dalam kegiatan evaluasi, tetapi juga dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Potensi partisipatif masyarakat perlu digerakkan, dan lembaga-lembaga, baik formal ataupun informal perlu diajak serta dalam suasana kegiatan pembangunan.

Pembangunan Daerah Jangka Panjang menghendaki terwujudnya mobilitasi se-

luruh kekuatan sosial politik, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga kekuatan dan semangat patriotisme, solidaritas dan tanggung jawab yang telah hidup dalam masyarakat dapat diarahkan kepada usaha-usaha pembangunan.

Semua ini memerlukan investasi yang besar dan berasal dari berbagai sumber, antara lain dari sumber daerah sendiri, pusat, Perbankan, Koperasi dan tabungan masyarakat.

2. Kebijakan Sektoral

a. Bidang Ekonomi.

Pembangunan ekonomi mengandung arti menggerakkan potensi ekonomi dengan alokasi sumber secara efisien, sehingga terciptanya hasil nyata yang optimal. Kekuatan ekonomi nyata akan diwujudkan melalui penanaman modal, kemampuan pengelolaan, peningkatan mutu sumber daya manusia serta perluasan kesempatan kerja, dan pemanfaatan teknologi maju dan tepat guna.

Pemanfaatan modal dan teknologi luar akan dipertimbangkan, jika sumber dalam negeri tidak tersedia, sepanjang tidak merugikan kepentingan Daerah dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi diusahakan agar lebih besar dari tambahan penduduk sehingga pendapatan per kapita nyata dapat terus meningkat. Seiring dengan ini, harus pula terjamin pembagian pendapatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Proses peningkatan pertumbuhan ekonomi harus dibimbing sedemikian rupa, sehingga golongan ekonomi lemah dapat berperan secara lebih nyata dalam setiap kegiatan ekonomi. Jurang pemisahan antara daerah pedesaan dan perkotaan harus diperkecil.

Peningkatan kegiatan usaha pembangunan tidak saja ditujukan kepada pengembangan sarana atau prasarana yang langsung dapat mendorong peningkatan produksi, tetapi juga harus mencakup pengembangan sektor sosial.

b. Bidang Agama, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Sosial Budaya.

Pembangunan yang diinginkan bukan hanya ekonomi, tetapi juga pembangunan spiritual, sehingga kehidupan rakyat benar-benar selaras antara kehidupan dunia dan akhirat. Jiwa dan semangat keislaman yang dimiliki oleh rakyat Aceh perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan usaha-usaha pembangunan.

Kebudayaan daerah harus dikembangkan, sehingga dapat menjadi unsur pendorong bagi terciptanya masyarakat adil dan makmur. Unsur-unsur kebudayaan luar yang dapat merusak nilai-nilai kebudayaan bangsa harus dihindarkan. Semangat patriotisme rakyat Aceh perlu diarahkan kepada usaha-usaha pembangunan, dan sifat-sifat kegotong royongan dalam masyarakat perlu dikembangkan.

c. Bidang Politik.

Dalam bidang politik pembangunan Daerah akan dititik beratkan pada pematapan kesadaran kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga usaha untuk mencapai tujuan Nasional dapat berjalan lancar.

Dalam rangka mencapai sasaran usaha untuk menciptakan, mengkonsolidasikan dan memanfaatkan kondisi-kondisi serta situasi untuk memungkinkan terlaksananya proses-proses pembaharuan kehidupan politik, sehingga dapat diciptakan keadaan dengan sistim politik yang benar-benar demokratis, stabil, dinamis, efektif, dan efisien yang dapat memperkuat kehidupan konstitusional, mewujudkan pemerintahan yang bersih, berkemampuan dan berwibawa, pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang semakin efektif serta terwujudnya kesadaran dan kepastian hukum dalam masyarakat yang semakin mantap.

d. Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Selain pembangunan di bidang ekonomi, agama dan sosial budaya, kegiatan pembangunan juga ditujukan untuk mempertinggi kesadaran hukum, untuk mewujudkan ketertiban, keamanan serta jaminan hidup. Pembangunan dalam bidang ini diperlukan dalam rangka memantapkan kesadaran bernegara.

Pembangunan jangka panjang Daerah Istimewa Aceh akan dicapai secara bertahap melalui serangkaian REPELITA Daerah ;

REPELITA I menitik beratkan pada usaha menghilangkan isolasi Daerah dan kendala-kendala yang menghambat pembaharuan serta menegakkan wibawa pemerintah dengan prioritas diberikan pada perbaikan prasarana ekonomi, pembangunan pertanian dan irigasi tanpa mengabaikan pembangunan sarana-sarana sosial lainnya. Repelita I menjadi landasan bagi tahap pembangunan berikutnya.

REPELITA II menitik beratkan pada sektor prasarana ekonomi yang menunjang perkembangan pertanian, irigasi yang mendukung pertanian dan pembangunan bidang sosial lainnya. Repelita II menjadi landasan untuk pembangunan tahap berikutnya.

REPELITA III memberi tekanan yang sama seperti halnya dengan Repelita II ditambah dengan usaha kearah pengembangan industri-industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi.

REPELITA IV menitik beratkan pada pembangunan prasarana, sarana dan institusi dalam rangka pengembangan pertanian terutama diversifikasi, perbaikan mutu serta meningkatkan ekspor hasil pertanian. Pembinaan sumber daya manusia dan mengembangkan industri-industri hilir yang terkait dengan tumbuhnya industri

kunci: serta mengembangkan industri kerajinan lainnya dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat.

REPELITA V diharapkan usaha pembangunan diarahkan kepada tercapainya keseimbangan antar sektor ekonomi.

3. Kebijakan Spatial

Selain kebijaksanaan sektoral, kebijaksanaan regional juga perlu dilaksanakan dalam rangka memperkecil ketimpangan regional di Daerah Istimewa Aceh. Ketimpangan pembangunan dan ketimpangan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dapat diperkecil dengan pendekatan pembangunan yang terpadu, bukan saja secara sektoral tetapi juga secara regional. Karena itu, Daerah Istimewa Aceh perlu dibagi atas beberapa wilayah pembangunan, sehingga memungkinkan pengembangan wilayah secara integral yang dapat dikaitkan dengan pembangunan sektoral. Demi terwujudnya kordinasi pelayanan yang lebih terpadu, maka wilayah pembangunan harus dikaitkan dengan wilayah administrasi pemerintahan.

Ruang lingkup suatu wilayah pembangunan, selain untuk memenuhi kebutuhan wilayah itu sendiri juga mencakup kegiatan-kegiatan yang memenuhi kebutuhan wilayah lain serta kebutuhan-kebutuhan nasional dan internasional. Dengan demikian perdagangan antara wilayah dalam propinsi ataupun dengan luar daerah dapat dimungkinkan, sehingga arus pertukaran barang dan jasa dapat dilaksanakan dengan lancar. Masing-masing wilayah dapat berkembang secara wajar dan rasional sesuai dengan sumber daya alam (resource base) yang tersedia dan keadaan sosiokultural yang hidup dalam masyarakat.

Keuntungan yang diperoleh dengan adanya wilayah pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Penciptaan pembangunan yang lebih seimbang antar masing-masing wilayah.
- b. Perencanaan dan realisasi eksekusi rencana program pembangunan yang sesuai dengan pola pengembangan wilayah.
- c. Kordinasi dan konsistensi usaha pembangunan dapat diusahakan secara maksimal.
- d. Pembentukan wilayah pembangunan membantu untuk merealisasikan efisiensi usaha dan pemerataan hasil pembangunan.

Pembagian wilayah pembangunan perlu disesuaikan dengan tingkat kemajuan pembangunan Daerah. Pembagian wilayah Aceh dalam beberapa wilayah pembangunan didasarkan kepada beberapa kriteria sebagai berikut :

- a. Dominasi pola produksi dalam suatu wilayah.
- b. Penggunaan prasarana perhubungan dalam rangka interaksi ekonomi dan sosial.

- c. Sumber daya alam serta kemungkinan pemanfaatannya.
- d. Arus pengembangan penduduk dan migrasi.
- e. Kondisi sosio-kultural yang lebih seragam.
- f. Batas-batas administrasi pemerintahan yang dapat terjangkau dan tersedianya paling tidak satu pusat pelayanan utama untuk setiap wilayah pembangunan, atau adanya kemungkinan pengembangan lebih lanjut pusat pelayanan yang telah ada.
- g. Kemungkinan pengembangan wilayah pembangunan sebagai suatu kekesatuan daerah perencanaan.

Berdasarkan kriteria tersebut diatas, maka Daerah Aceh dibagi atas 4 Wilayah Pembangunan, yaitu :

- a. Wilayah Pembangunan I (WP-I)
Wilayah Pembangunan I (WP-I) ini terdiri dari Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat dan Aceh Selatan dengan pusat pengembangannya adalah Meulaboh dan pintu gerbangnya adalah pelabuhan Susoh.
- b. Wilayah Pembangunan II (WP-II)
Wilayah Pembangunan II (WP-II) ini mencakup Kabupaten Daerah Tingkat II Pidie, Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, Kotamadya Banda Aceh dan Sabang, dengan pusat pengembangannya adalah Banda Aceh dan pintu gerbangnya adalah Pelabuhan Malahayati dan Sabang.
- c. Wilayah Pembangunan III (WP-III)
Meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur dan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara dengan pusat pengembangannya di Lhokseumawe dan pintu gerbangnya pelabuhan Krueng Geukuh dan pelabuhan Langsa.
- d. Wilayah Pembangunan IV (WP-IV)
Meliputi Daerah Tingkat II Aceh Tengah dan Aceh Tenggara. Pusat pembangunannya WP-IV adalah Takengon, dengan pintu gerbangnya Lhokseumawe.

Orientasi pengembangan wilayah tidak hanya memerlukan fasilitas di bidang ekonomi tetapi juga memerlukan berbagai macam fasilitas sosial lainnya, sehingga mampu menjalin hubungan komplementaritas dan ketergantungan satu dengan yang lain. Pengutamaan beberapa program yang memiliki nilai ekonomi yang strategis di dalam suatu wilayah pembangunan perlu diselaraskan dengan perkembangan sektor-sektor lainnya di wilayah tersebut.

Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berimbang, terutama antara Aceh dengan Sumatera Utara, dan Sumatera Bagian Tengah, maka kerja sama antar daerah perlu ditingkatkan. Kerja sama dimaksud menyangkut dengan penyempurnaan prasarana dan fasilitas penunjang masing-masing wilayah.

E. CATATAN

Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang ini merupakan landasan pokok bagi penyusunan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Menengah, yaitu Pola Umum Pelita IV Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

B A B I I I

POLA UMUM PELITA IV DAERAH

A. PENDAHULUAN

Pelita III telah mencapai hasil-hasil yang positif, sehingga keadaan sudah lebih mantap untuk pembangunan Pelita IV sebagai pelaksana tahap IV dari pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang.

Dalam Pelita IV sebagai kelanjutan dan peningkatan dari Pelita III akan ditingkatkan usaha-usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, baik lahir maupun bathin, mendorong pembagian pendapatan yang lebih merata dan memperluas kesempatan kerja. Pelita IV akan melanjutkan pemerataan pembangunan antara daerah tingkat II, peningkatan produksi pangan baik kualitas maupun kuantitasnya, pengembangan kemampuan golongan ekonomi lemah, koperasi, perbaikan mutu pendidikan, dan perluasan pelayanan kesehatan dan sebagainya. Pelita IV meliputi jangka waktu 1 April 1984 sampai dengan 31 Maret 1989.

"Implementasi pelaksanaan Repelita IV Daerah adalah penerapan hubungan pembangunan Nasional yang disesuaikan dengan kondisi Daerah seperti Panca Krida Kabinet Pembangunan IV dan Trilogi Pembangunan Nasional."

B. T U J U A N

Tujuan pembangunan selama Pelita IV adalah :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup materiil dan spiritual dunia akhirat dan diridhai oleh Allah Yang Maha Kuasa.
2. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia serta sarana lainnya dalam hubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga tercapai keseimbangan pertumbuhan antar sektor dan keseimbangan lingkungan hidup untuk memperkuat landasan pembangunan selanjutnya.
3. Meningkatkan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan yang merata dan meningkatkan keterkaitan pembangunan (Ekonomi, Politik, Sosial Budaya ketertiban keamanan) di Daerah Istimewa Aceh.
4. Memantapkan keseimbangan pembangunan dan hasil-hasilnya bagi seluruh rakyat, sistim tata ruang dan tata guna tanah secara lebih terarah dan terpadu.

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan situasi dan perkembangan pembangunan, maka perlu diberikan prioritas pembangunan, yaitu :

1. Peningkatan dan perluasan Pembangunan prasarana ekonomi yang didukung oleh pembinaan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan daerah pada umumnya terutama sektor pertanian, sektor industri dan sektor-sektor lainnya, serta pengembangan wilayah pembangunan secara terpadu.
2. Pembangunan pertanian melalui peningkatan mutu, disamping peningkatan produksinya.
3. Pembangunan bidang sosial pada umumnya yang meliputi pendidikan, peman-tapan hidup beragama, kesehatan dan kesejahteraan sosial lainnya.

D. ARAH DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. U m u m

Dalam Pelita IV, arah dan kebijaksanaan yang ditempuh selama Pelita III perlu dilanjutkan dan ditingkatkan agar makin nyata dapat dirasakan peningkatan taraf hidup, kecerdasan, kesejahteraan yang makin merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan tersebut harus berjalan bersama-sama dengan pembi-naan stabilitas daerah yang sehat dan dinamis baik di bidang politik maupun eko-nomi, karena kekacauan dalam masyarakat dan kegoncangan ekonomi akan meng-hambat pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan disamping mening-katkan pendapatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, dalam rangka me-wujudkan asas keadilan sosial, sehingga pembangunan tersebut tidak hanya dituju-kan untuk meningkatkan produksi, melainkan pola untuk mencegah melebarnya jurang pemisah antara golongan kaya dan miskin baik di kota maupun di desa. Ber-dasarkan kenyataan-kenyataan selama Pelita III, maka arah dan kebijaksanaan pem-bangunan dimasa mendatang perlu lebih dimantapkan.

2. Kebijakan Sektor

- a. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, perlu dipertahankan dengan me-naikkan produksi dan jasa di berbagai sektor pembangunan ekonomi yang meliputi pertanian, industri, pertambangan dan energi serta lain-lain, de-ngan tetap berorientasi pada perluasan kesempatan kerja. Usaha-usaha mempercepat laju pembangunan perlu didukung oleh peningkatan peman-faatan teknologi, disamping peningkatan pemanfaatan sumber-sumber pembangunan lainnya. Pembangunan pertanian dalam arti luas perlu di-tingkatkan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan produksi perta-nian untuk memperbanyak surplus pangan dan meningkatkan produksi ta-naman perdagangan baik untuk pasar dalam negeri, maupun ekspor, serta meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja, mendo-rong swadaya prakarsa dan peranan serta dari seluruh masyarakat.

- b. Perkembangan sektor industri tidak terlepas dari pembangunan sektor-sektor lainnya. Peranan sektor industri adalah untuk memperluas lapangan kerja, menghasilkan barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat dan oleh sektor-sektor lain, serta menghasilkan devisa. Industri yang terus akan dikembangkan dalam Pelita IV adalah industri-industri yang menunjang sektor pertanian, industri kerajinan dan ekstraktif.
- c. Pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah memerlukan sumber pembiayaan yang besar dan terus menerus, sedangkan kemampuan daerah untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah relatif terbatas. Dalam hal ini penerimaan pembangunan dari bantuan pusat baik melalui program-program Inpres maupun program sektoral perlu ada penambahan mengingat potensi daerah ini yang cukup banyak yang amat membantu perkembangan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Proses pertumbuhan Industri kunci di Wilayah Aceh Utara disamping memberikan berbagai macam keuntungan, juga telah menimbulkan dualisme ekonomi dan teknologi. Keadaan ini telah menciptakan daerah-daerah inti berkembang pesat, sedang daerah-daerah sekitarnya relatif belum berkembang. Untuk mengatasi hal ini industri kunci tersebut secara bersama-sama harus memberi perhatian terhadap pembangunan daerah ini, terutama daerah pedesaan yang berdekatan dengan industri tersebut.
- d. Langkah-langkah untuk mendorong ekspor barang-barang diluar minyak dan gas bumi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja, di samping untuk menambah penerimaan devisa bagi negara. Untuk itu perlu diperluas pasaran dan ditingkatkan daya saing barang-barang ekspor itu di luar negeri dengan jalan meningkatkan efisiensi produksi, memperbaiki mutu barang, memperlancar angkutan, dan mempermudah prosedur.
- e. Perluasan kesempatan kerja terutama di daerah pedesaan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Oleh karena itu perlu lebih ditingkatkan dan dimantapkan langkah-langkah untuk mendorong perluasan kesempatan kerja, baik bersifat sektoral, maupun regional. Keseluruhan kebijaksanaan tersebut ditujukan untuk memperluas lapangan kerja baru sepadan dengan pertambahan angkatan kerja, serta mengurangi pengangguran yang ada dengan lebih mempercepat laju pertumbuhan lapangan kerja di luar sektor pertanian.

Dalam rangka perluasan kesempatan kerja serta mencegah masalah penyebaran penduduk, pemindahan penduduk antar daerah tingkat II yang kelebihan tenaga kerja ke daerah yang kekurangan tenaga kerja melalui program pemukiman kembali penduduk perlu ditingkatkan. Di samping itu per-

- lu diberi perhatian yang lebih besar kepada pembinaan usaha tani, usaha industri di daerah-daerah pemukiman baru.
- f. Program transmigrasi dan transmigrasi lokal dilaksanakan secara terarah dan terpadu dalam hubungan dengan pemerataan pembangunan daerah. Usaha transmigrasi diharapkan dapat meningkatkan integrasi nasional bukan saja dalam arti ekonomi, tetapi juga sosial budaya.
 - g. Pengembangan pariwisata adalah dengan memperkenalkan kebudayaan, keindahan alam, kepribadian daerah, kepada masyarakat wisatawan, dan sekaligus dapat memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Untuk menunjang sektor ini perlu perencanaan yang terpadu dengan sektor-sektor lain.
 - h. Dalam rangka usaha pemerataan pembangunan ke seluruh daerah tingkat II, maka akan dilanjutkan dan ditingkatkan pembangunan daerah dan pembangunan pedesaan yang diarahkan kepada perluasan kesempatan kerja pembinaan dan pengembangan lingkungan pemukiman pedesaan dan perkotaan yang sehat, serta meningkatkan kemampuan penduduk untuk memanfaatkan sumber kekayaan alam. Dalam hubungan ini berbagai kebijaksanaan dan program pembangunan sektoral, program daerah tingkat I, program Inpres dan program lainnya perlu diserasikan untuk pengembangan potensi dan mengatasi permasalahan-permasalahan di masing-masing daerah tingkat II. Usaha pembangunan lebih ditingkatkan dan diperluas untuk memperbaiki penghasilan kelompok-kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti nelayan, pengrajin, petani penggarap, petani pemilik yang tanahnya sangat kecil, buruh tani dan sebagainya dalam rangka makin memeratakan pembangunan dan hasil-hasilnya, dengan jalan memperkuat permodalan, meningkatkan keahlian dan kemampuan serta memperluas pemasaran.
 - i. Pembinaan dunia usaha terutama pengusaha golongan ekonomi lemah termasuk koperasi agar mampu memegang peranan sebagai tulang punggung perekonomian daerah, dalam rangka menciptakan pemerataan kesejahteraan rakyat dan memperluas kesempatan berusaha. Untuk itu perlu ditingkatkan keahlian dan kemampuannya serta penyediaan kredit yang memadai.
 - j. Pengolahan sumber alam dan lingkungan hidup diarahkan agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestarian, sehingga akan tetap bermanfaat bagi generasi-generasi mendatang. Untuk ini reboisasi dan penghijauan serta pengembalian pada fungsi yang seharusnya dari sumber-sumber alam dan lingkungan hidup yang mengala-

mi kemunduran dan kerusakan perlu dilanjutkan dan lebih ditingkatkan.

Pembangunan bidang ekonomi telah memperlihatkan hasil positif terhadap pembangunan bidang sosial. Hal ini terlihat dengan semakin meningkatnya kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk memperluas tersedianya sarana-sarana agama, prasarana-prasarana dan sarana pendidikan, kesehatan, perumahan dan sebagainya.

Usaha ini perlu diperluas dan ditingkatkan. Pembinaan dan peningkatan ketaqwaan kepada Allah Yang Maha Kuasa merupakan modal utama yang tidak ternilai harganya dan tidak terpisahkan dari proses pembangunan.

- k. Dengan makin meningkat dan kompleknya pembangunan semakin perlu ditingkatkan kordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan, yang dilandasi oleh disiplin dan semangat pembangunan yang tinggi dari aparatatur perencanaan, pelaksana dan aparatatur pengawas. Untuk itu perlu ditingkatkan peranan lembaga perencanaan dan pengawasan di daerah tingkat II.

3. Kebijakan Spatial

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pembangunan Spatial Daerah Istimewa Aceh di kelompokkan kedalam empat wilayah pembangunan (WP) yaitu :

- a. Wilayah Pembangunan I (WP-I)
Terdiri dari Daerah Tingkat II Aceh Barat dan Aceh Selatan dengan kegiatan didominasi pada pangan dan kemungkinan diversifikasi tanaman pangan, export dan pertambangan. Pusat pertumbuhan adalah Meulaboh dan pintu gerbang adalah pelabuhan Susoh.
- b. Wilayah Pembangunan II (WP-II)
Mencakup Daerah Tingkat II Pidie, Aceh Besar, Kotamadya Banda Aceh dan Kotamadya Sabang dengan dominasi pangan serta kemungkinan diversifikasi tanaman pangan dan pengembangan peternakan. Wilayah ini mempunyai pusat pertumbuhan Banda Aceh dan pintu gerbangnya adalah pelabuhan Melahayati dan Sabang.
- c. Wilayah Pembangunan III (WP-III)
Meliputi Daerah Tingkat II Aceh Timur dan Aceh Utara dengan potensi perkembangan pertambangan, industri dan pertanian (pangan dan export serta perdagangan) didalam wilayah ini terutama di Utara akan berkembang suatu kawasan industri raksasa yang akan berpengaruh besar terhadap bangunan nasional dan daerah.
Dimasa mendatang wilayah ini, akan menjadi suatu manufakturing areal

yang penting di Indonesia.

Wilayah ini mempunyai pusat pertumbuhan Lhokseumawe dan pintu gerbangnya pelabuhan Krueng Geukuh dan pelabuhan Langsa.

d. Wilayah Pembangunan IV (WP-IV)

Meliputi Daerah Tingkat II Aceh Tengah dan Aceh Tenggara. Potensi yang dikembangkan adalah tanaman pangan dan tanaman export, perikanan darat, pertambangan, kehutanan dan industri hasil hutan serta industri pariwisata. Pusat pertumbuhan WP-IV adalah Takengon dengan pintu gerbangnya Lhokseumawe).

Tujuan pembagian wilayah semacam itu adalah dalam usaha untuk lebih meningkatkan dan melancarkan pembangunan daerah dan pedesaan. Dengan demikian berbagai kebijaksanaan dan program pembangunan sektoral dan daerah akan lebih diserasikan dengan potensi dan permasalahan masing-masing daerah. Daerah-daerah minus dan terisolir perlu mendapat perhatian khusus, terutama dalam rangka perluasan daerah-daerah pertanian. Demikian juga pengembangan daerah yang kurang penduduk dan daerah-daerah transmigrasi. Berkaitan dengan itu semua, pembangunan prasarana ekonomi dan sosial secara lebih merata keseluruh wilayah perlu dilaksanakan dan ditingkatkan.

E. SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH EKONOMI

1. Pertanian dan Pengairan.

a. Pertanian.

1). Pertanian tanaman pangan.

- a). Pengembangan komoditi padi, palawija dan hortikultura di suatu wilayah yang sesuai dengan potensi dan pola tanam yang ada di wilayah bersangkutan, serta mengikuti Pola Wilayah Kerja Balai Penyuluh Pertanian (WKBPP) Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) dan Wilayah Kelompok (Wilkel).
- b). Usaha pengembangan komoditi padi, palawija, dan hortikultura dilaksanakan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi, melalui peningkatan usaha tani keluarga dengan tidak menutup kemungkinan usaha tani padat modal.
- c). Pemanfaatan tanah pekarangan hendaknya ditujukan sebagai lubang hidup, apotik hidup, dan dapur hidup.
- d). Pengembangan produksi di suatu wilayah diarahkan mengikuti usaha-usaha perbaikan teknologi lepas panen pengembangan be-

nih dan bibit, proteksi tanaman, pembinaan kelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam. Disamping itu akan diusahakan pengembangan mekanisasi secara selektif, peningkatan informasi dan penyuluhan, serta pembinaan usaha tani.

- e). Penanganan pasca panen di tingkat petani dilaksanakan dalam rangka menjamin kelangsungan peningkatan kuantitas dan kualitas produksi di suatu wilayah, yang sekaligus menjamin adanya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

2). Peternakan.

- a). Pengembangan dan peningkatan ternak potong (sapi, kerbau) sebagai sumber protein, komoditi ekspor, diusahakan dengan mengintensifkan pemanfaatan lahan (padang alang-alang) yang tersedia dan sumber nabati lainnya.
- b). Usaha memenuhi kebutuhan hasil ternak daging dan ternak perah untuk industri-industri besar di Aceh, perlu meningkatkan kualitas produksi peternakan dengan jalan pengadaan bibit ternak unggul dan kegiatan inseminasi buatan secara terpadu.
- c). Kegiatan masyarakat dalam usaha peternakan, pengadaan sarana produksi ditingkatkan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.
- d). Peningkatan pemanfaatan limbah industri dan limbah pertanian sebagai bahan makanan ternak.

3). Perkebunan

- a). Pengembangan produksi perkebunan dilaksanakan dengan pola Unit Pelaksana Proyek (UPP), dan Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) atau Neucleus Estate (NES) serta pola terarah, selektif daerah yang belum terjangkau.
- b). Pengembangan produksi dititik beratkan pada komoditi yang mempunyai harga yang relatif lebih baik.
- c). Bagi komoditi-komoditi yang selalu menggunakan tanah-tanah baru yang berakibat negatif diarahkan pada usaha intensifikasi dan diversifikasi.
- d). Pengembangan produksi kopi dititik beratkan pada pembinaan usaha intensifikasi dan Rehabilitasi.
- e). Pengembangan wilayah dengan usaha perkebunan swasta/nasional diberikan insentif yang lebih menarik dengan mengikut ser-

takan rakyat/petani.

- f). Tanah-tanah dan kebun-kebun swasta yang terlantar ditingkatkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- g). Pengembangan perkebunan rakyat tradisional seperti pala, nilam, serih dan lada.

4). Kehutanan.

- a). Usaha untuk menjamin kelestarian dan pemanfaatan hutan serta pemantapan jangka waktu pemulihan tegalan, maka inventarisasi hutan dan penelitian perlu lebih ditingkatkan.
- b). Pengawasan di areal-areal Hak Pengusaha Hutan (HPH) perlu ditingkatkan untuk mencegah siklus tebang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Di samping itu areal kosensi yang sudah tidak normal dan tidak merata potensinya, akan dilaksanakan pemberian jatah tebang secara ketat.
- c). Industri hasil hutan benar-benar diarahkan kepada industri terpadu.
- d). Pengembangan suaka alam dan hutan wisata, terutama pengembangan kawasan konservasi (Taman Nasional Gunung Leuser) diharapkan tidak hanya bertujuan konservasi semata-mata, melainkan juga bagi kepentingan pendidikan, penelitian dan rekreasi.
- e). Pemanfaatan kelembagaan, status hukum, tata guna hutan kesepakatan dan inventarisasi hutan atas dasar klasifikasinya perlu diintensifkan guna tercapainya pembinaan hutan yang lebih baik.
- f). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam usaha reboisasi, penghijauan dan rehabilitasi tanah kritis di Wilayah tertentu perlu diintensifkan.
- g). Pola pengembangan dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara terpadu perlu disempurnakan karena sangat membantu pengembangan suatu wilayah.
- h). Penyuluhan kepada masyarakat tentang fungsi hutan dengan segala aspeknya, perlu ditingkatkan dalam rangka mengatasi meluasnya tanah-tanah kritis.
- i). Pembinaan ekonomi masyarakat, yang berkaitan dengan pembinaan usaha tani menetap, akan dikembangkan agroforestri (hutan Kayu Bakar, silvi kuntura dan hutan rekreasi, yang sekaligus dilakukan pembinaan terhadap koperasi yang bergerak di bidang-

bidang hutan.

- j). Pengawasan untuk melindungi hutan dari berbagai gangguan, perlu ditingkatkan melalui pembinaan polisi kehutanan, penyebar luasan undang-undang, menegakkan disiplin hutan dan rasa cinta alam dan hutan.

5). Perikanan

- a) Dalam rangka mengembangkan pembangunan perikanan ditempuh melalui cara-cara :

- (1) – Intensifikasi usaha yang diarahkan pada budi daya ikan kolam (tambak) dan sawah.
- (2) – Ekstensifikasi usaha yang diarahkan pada budi daya ikan kolam air tawar, dalam kaitan pemanfaatan tanah pekarangan.
- (3) – Modernisasi dan motorisasi usaha penangkapan ikan laut, dengan mempertimbangkan kelestarian ekologi lautan, dan
- (4) – Diversifikasi usaha dalam rangka penganeekaragaman usaha nelayan baik vertikal maupun horizontal.

- b). Dalam kaitan pengembangan perikanan, kerja sama dengan sektor lain seperti industri, pekerjaan umum, perdagangan dan koperasi, pendidikan, perbankan dan bahkan perlu dibina dan ditingkatkan.
- c). Perlu diatur pola penggunaan sawah untuk peternakan ikan dalam rangka diversifikasi usaha tani.
- d). Pengamanan tentang penggunaan insektisida perlu diintensifkan untuk mencegah musnahnya mikrobio/jasad hidup (ikan) yang ada di suatu wilayah.
- e). Keseimbangan lingkungan hutan pantai dan pencegahan pemotongan hutan bakau perlu dipertahankan dan dijaga terus-menerus.

b. Irigasi dan Pengairan.

- 1) Pembangunan irigasi baru yang perencanaannya telah dilakukan dalam Pelita III dan melanjutkan pembangunan irigasi yang belum selesai, untuk mendukung pembukaan dan pemanfaatan areal pertanian yang baru dalam rangka meningkatkan produksi pangan terutama beras.
- 2) Untuk memanfaatkan air yang tersedia secara optimal maka jaringan

tertier dan kuarter perlu terus ditingkatkan.

- 3) Peningkatan kesadaran, kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha pemeliharaan saluran dan pengelolaan pengairan, serta penggunaan air secara efisien, antara lain dengan membina dan mengembangkan kelompok-kelompok petani pemakai air.
- 4) Pengembangan daerah rawa perlu ditingkatkan dengan tujuan untuk memperluas areal pertanian. Dengan kegiatan tersebut rawa-rawa yang tidak produktif dapat dikembangkan menjadi daerah pertanian baru yang berupa irigasi reklamasi rawa.
- 5) Untuk pengamanan daerah pemukiman penduduk serta daerah pertanian maka usaha pengaturan dan pengamanan sungai perlu lebih ditingkatkan dan dikembangkan.
- 6) Pengaturan tata guna air untuk air bersih/air minum, air untuk keperluan pertanian, untuk keperluan industri serta pembangkit tenaga listrik.

2. Industri

- a. Memperbaiki struktur ekonomi daerah dan untuk meningkatkan keterkaitan dan keterpaduan antar sektor dalam rangka memperkuat perekonomian daerah.
- b. Mengembangkan industri terutama industri hilir, yang mempunyai prospek yang baik untuk berkembang dalam rangka usaha memperbesar dampak ekonomi dari pertumbuhan industri kunci.
- c. Mengusahakan penyusunan rencana induk dan rencana terperinci serta terbinanya kordinasi pembangunan yang serasi dan terpadu bagi pengembangan kawasan industri kunci.
- d. Membantu usaha di bidang industri kecil dan kerajinan yang memiliki prospek untuk berkembang terutama dalam bidang management, permodalan, pemasaran, teknologi produksi, perbaikan mutu barang hasil dan sarana penunjang lainnya dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di pedesaan.
- e. Membantu perkembangan industri pengolahan hasil pertanian ekspor yang mengalami kemerosotan permintaan dari luar negeri.
- f. Meningkatkan lebih lanjut peranan KADIN dalam rangka menunjang pembangunan sektor industri.

3. Pertambangan dan Energi.

a. Pertambangan.

- 1) Pengembangan dan pembangunan sektor pertambangan diharapkan dapat menimbulkan proses pengkaitan, baik secara vertikal mulai tahap kegiatan hulu sampai hilir maupun secara horizontal dengan menumbuhkan industri-industri sampingan. Dalam hal ini daerah dapat berperan antara lain berupa penyediaan tanah, tenaga kerja, bahan baku atau penolong dan jasa-jasa lainnya.
- 2) Peningkatan penelitian sektor pertambangan dan galian dalam rangka pemanfaatan potensi secara lebih optimal untuk kepentingan pembangunan baik nasional maupun daerah.
- 3) Pengelolaan sektor pertambangan perlu diserasikan dengan pembangunan daerah disertai peningkatan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan.
- 4) Usaha pertambangan rakyat perlu ditingkatkan yang produksinya dimanfaatkan didaerah ini dan daerah-daerah lain untuk kebutuhan bahan baku sektor industri dan sektor-sektor lain.

b. Energi

- 1) Usaha diversifikasi sumber energi, maka perlu diadakan penelitian tentang kemungkinan pengembangan sumber-sumber energi lainnya seperti tenaga air, tenaga panas bumi, tenaga angin, tenaga uap dan sebagainya.
- 2) Penelitian kemungkinan pembangunan tenaga listrik dengan menggunakan tenaga air atau uap terutama untuk daerah Lhok Seumawe dan Banda Aceh; sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri.
- 3) Peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik dan jaringan transmisi serta jaringan distribusi bagi kota-kota kabupaten dan kota madya dan kota-kota kecamatan.
- 4) Listrik masuk desa perlu lebih ditingkatkan lagi untuk mendorong kegiatan ekonomi masyarakat di daerah pedesaan.

4. Perhubungan dan Pariwisata

a. Perhubungan

- 1) Jalan/Jembatan
Pada akhir Pelita IV seluruh jalan arteri di daerah ini diharapkan

telah dapat ditingkatkan, yaitu :

(a) Jalan arteri antara lain terdiri dari :

- (1) Jalan Banda Aceh — Lhokseumawe — Batas Sumut.
- (2) Jalan Banda Aceh — Meulaboh — Batas Sumut
- (3) Jalan Bireun — Takengon — Kutacane — Batas Sumut, dan

(b) Jalan kolektor antara lain terdiri dari :

- (1) Jalan Beureunun — Tangse — Geumpang — Tutut — Meulaboh.
- (2) Jalan Simpang Teut — Jeuram — Beutong Ateuh — Kuyun — Takengon.
- (3) Peureulak — Lokop — Pining — Blang Kejeren — Trangon — Blang Pidie.
- (4) Kr. Raya — Seulimum — Tangse dan Lintas Simeulu.

Demikian pula sebagian besar jembatan kritis dan rakit penyeberang telah tidak ada lagi jalan-jalan kolektor akan dikembangkan pula sesuai dengan kebutuhan, terutama jalan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah pembangunan. Perluasan angkutan pertumbuhan wilayah pembangunan. Perluasan angkutan penyeberangan, lalu lintas angkutan sungai, pengembangan armada baik angkutan darat maupun angkutan sungai, dan pengawasan lalu lintas jalan raya perlu ditingkatkan.

Peranan swasta dalam bidang usaha transportasi akan dikembangkan kecuali bila secara ekonomis belum menguntungkan akan diusahakan pengangkutan yang dilakukan oleh negara (perintis).

2) Perhubungan Laut

Peningkatan fungsi pelabuhan-pelabuhan di pantai utara dilaksanakan melalui usaha peningkatan sarana, prasarana dan pelayanan. Untuk pelabuhan-pelabuhan di pantai barat dan selatan selain peningkatan pelayanan perintis diusahakan pula rencana pelabuhan yang secara fungsional berkatagorikan pelabuhan kolektor.

3) Perhubungan Udara

Pelabuhan udara dan pelabuhan udara perintis yang telah ada akan terus dikembangkan. Pelabuhan-pelabuhan udara perintis yang secara ekonomis menguntungkan akan ditingkatkan menjadi pelabuhan Udara. Di samping itu akan diusahakan pula pembukaan beberapa pelabuhan perintis bagi daerah-daerah terpencil.

4) Kereta Api

Jalan kereta api yang sekarang ini dalam keadaan tidak berfungsi lagi, akan diusahakan untuk dipulihkan kembali sesuai dengan keadaan dan kebutuhan pengangkutan. Peningkatan akan dilaksanakan mulai dari Besitang sampai dengan Banda Aceh.

5) Pos dan Giro

Pembangunan sektor ini diusahakan agar sebagian besar kecamatan sudah dapat dilayani oleh kantor pos, kantor pos pembantu dan sebagainya. Bila pembangunan sebuah kantor pos pembantu belum dimungkinkan, maka akan diusahakan untuk dapat dilayani oleh sebuah rumah pos.

6) Telekomunikasi

Pelayanan telekomunikasi akan diperluas terutama jasa telepon dan telek untuk menunjang sektor-sektor ekonomi dan sektor lainnya.

b. Pariwisata

- 1) Dalam rangka pengembangan pariwisata perlu dibuat suatu masterplan pembangunan kepariwisataan, sehingga pembangunan dan pengembangannya di masa mendatang dapat mencapai sasaran yaitu : memperkenalkan alam dan kebudayaan daerah, meningkatkan penerimaan devisa bagi negara, memperluas lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Sebelum berkembangnya pariwisata untuk wisatawan luar daerah atau luar negeri, perlu dikembangkan pariwisata untuk wisatawan lokal.
- 2) Dalam hubungan dengan persiapan pengembangan pariwisata perlu diambil langkah-langkah antara lain kegiatan promosi, penyediaan sarana dan prasarana serta lain-lainnya yang ada hubungan dengan kepariwisataan.

5. Perdagangan dan Koperasi

a. Perdagangan

Pembangunan sektor perdagangan bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan mutu sarana pemasaran dan menyempurnakan sarana penyampaian informasi pasar agar dapat tersebar secara luas, cepat dan dalam waktu yang tepat.
- 2) Membina ke arah terwujudnya suatu sistem tata niaga yang efisien

terutama terhadap komoditi ekspor yang lemah, dalam rangka mendorong usaha peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat di pedesaan.

- 3) Melanjutkan dan meningkatkan pembinaan dan pengembangan daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Sabang agar dapat berfungsi sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 3 dan 4 tahun 1970.
- 4) Membina sistim perdagangan yang dapat merangsang pengembangan dunia usaha dan dapat menghindari timbulnya persaingan yang tidak sehat diantara berbagai bidang dan bentuk usaha.
- 5) Memanfaatkan sumber-sumber dibidang perdagangan secara optimal untuk menciptakan Kesempatan Kerja yang lebih luas dan merata di seluruh daerah, terutama disebabkan oleh adanya perkembangan industri kunci yang pesat.
- 6) Perlu meningkatkan peranan KADIN dalam rangka pembinaan dan pengembangan sektor perdagangan.

b. Perkoperasian

Kebijaksanaan pembangunan perkoperasian adalah :

- 1) Usaha pengefektifkan pembinaan koperasi sebagai salah satu tulang punggung ekonomi nasional.
- 2) Pembinaan kelembagaan koperasi ditingkatkan dan diperluas sehingga menjangkau seluruh pelosok daerah.
- 3) Peningkatan dan perluasan kegiatan latihan perkoperasian agar masalah organisasi dan tata laksana koperasi dapat dikembangkan secara melembaga dan berkesinambungan.
- 4) Pembinaan koperasi dalam bidang pemupukan modal dalam masyarakat lebih ditingkatkan lagi.
- 5) Meningkatkan peranan Dekopin Wil dalam rangka pembinaan dan pengembangan koperasi.

6. Pengembangan Dunia Usaha

Pembinaan usaha swasta dan usahawan golongan ekonomi lemah perlu ditingkatkan dan diperluas terutama dalam usaha mendukung serta membantu penciptaan kesempatan kerja. Usaha-usaha peningkatan mutu kewiraswastaan dilaksanakan melalui peningkatan modal dan teknologi, penataran, konsultasi usaha, panel diskusi, bimbingan praktis, dan pembi-

naan melalui kegiatan lintas sektoral. Prosedur kredit perlu lebih dipermudah, terutama untuk membantu pengembangan pengusaha ekonomi lemah.

7. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

a. Tenaga Kerja

- 1) Perluasan dan pemerataan serta peningkatan mutu tenaga kerja merupakan kebijaksanaan yang menyeluruh di semua sektor pembangunan. Dalam hubungan ini program-program sektoral, program-program Inpres dan program pembangunan daerah perlu selalu menciptakan perluasan kesempatan kerja sebanyak mungkin.
- 2) Perlindungan terhadap tenaga kerja di semua sektor pembangunan diselenggarakan melalui perbaikan upah, syarat kerja, kordinasi dan hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial dalam rangka perbaikan kesejahteraan tenaga kerja secara keseluruhan.
- 3) Peningkatan kualitas tenaga kerja serta pengurangan ketidakseimbangan antara kualitas yang diinginkan dengan kualitas yang tersedia melalui latihan kerja untuk mendapat tenaga-tenaga terampil yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan.
- 4) Penyusunan suatu perencanaan tenaga kerja daerah untuk lebih meningkat pembinaan ketenaga kerjaan serta munculnya kesempatan kerja baru baik di sektor pemerintah, maupun di sektor swasta nasional dan asing.
- 5) Peningkatan dan pengembangan informasi kesempatan kerja secara menyeluruh dan terpadu.

b. Transmigrasi

- 1) Penyediaan areal transmigrasi secara terpadu dengan perluasan sawah, perkebunan inti dengan penelitian dan perencanaan yang mantap.
- 2) Pembinaan daerah Transmigrasi secara terpadu, sehingga peningkatan kualitas transmigran beriringan dengan pengadaan sarana produksi, kredit, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan pelayanan-pelayanan lainnya.
- 3) Pemindahan dan pemukiman kembali penduduk daerah minus dan daerah terpendil untuk lebih meratakan pembangunan dan keadilan sosial.

8. Pembangunan Daerah, Desa dan Kota

Dalam Pelita IV, pembangunan daerah, desa dan kota memegang peranan penting. Langkah-langkah yang ditempuh dalam bidang ini adalah :

- a. Mengembangkan wilayah pembangunan sebagai unit daerah perencanaan (regional planning) dalam rangka usaha merealisasikan kegiatan pembangunan yang merata di antara semua wilayah pembangunan.
- b. Memantapkan fungsi dan peranan BAPPEDA Daerah Tingkat II serta kerja sama yang terkoordinasikan di antara BAPPEDA Daerah Tingkat II dari wilayah pembangunan yang sama untuk mengefektifkan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
- c. Memantapkan secara bertahap sistim perencanaan pembangunan dari bawah ke atas (bottom up planning).
- d. Mempersiapkan perencanaan tata ruang dari kota-kota yang sedang dan yang diperkirakan akan berkembang dengan pesat untuk mencegah terjadinya ketimpangan planogis di masa depan.
- e. Mengembangkan lebih lanjut sarana pelayanan dari pusat pelayanan utama dari setiap wilayah pembangunan untuk meningkatkan fungsi dan peranan kota-kota tersebut dalam pembangunan daerah.

9. Sumber Alam dan Lingkungan Hidup

Sumber alam dan lingkungan hidup telah merupakan masalah nasional yang besar dan serius. Dalam bidang ini kebijaksanaan diarahkan untuk :

- a. Meningkatkan usaha reboisasi, dan penghijauan dalam rangka konservasi hutan, air dan tanah, mencegah erosi, mengurangi bahaya banjir dan untuk mengurangi/mencegah perluasan areal perladangan berpindah dan aktivitas lainnya yang merugikan. Perhatian utama akan diberikan pada Daerah Tingkat II Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Utara, dan Aceh Timur untuk memelihara sumber air yang cukup bagi kebutuhan industri, pertanian dan kebutuhan rumah tangga.
- b. Melaksanakan usaha penyusunan dan pengaturan peta tata guna tanah yang menyeluruh.
- c. Mengelola sumber daya alam yang tersedia secara berencana dan terpadu atas dasar hasil studi kelayakan, sehingga dapat diperoleh dampak positif yang maksimal serta berkesinambungan untuk menjamin dan melayani kebutuhan masa kini dan mendatang.
- d. Meningkatkan pendidikan dan penyuluhan dalam rangka memantapkan kesadaran berlingkungan hidup bagi segenap lapisan masyarakat,

agar dengan berbagai cara ikut berperan serta melestarikannya, serta memasyarakatkan Undang-undang RI No. 4 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- e. Memanfaatkan sumber daya alam secara lestari, seimbang, selaras dan serasi, sehingga dapat diwariskan kepada generasi-generasi mendatang, untuk tujuan menunjang dan menyediakan sarana pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebudayaan manusia pada umumnya.
- f. Mengusahakan tersedianya data/informasi yang lebih terperinci seperti peta geologi, peta tofografi, potret udara, data iklim/cuaca dan lain-lain, untuk menunjang kegiatan inventarisasi dan evaluasi sumber alam yang ada.
- g. Memperbanyak tenaga teknis yang terampil dan berdedikasi dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengelolaan sumber daya alam.

AGAMA DAN SOSIAL BUDAYA

1. A g a m a

Pembangunan Keagamaan ditujukan untuk :

- a. Memantapkan iman dan taqwa/pengabdian kepada Allah Yang Maha Kuasa.
- b. Meningkatkan peranan Majelis Ulama, Badan Harta Agama dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya dalam upaya pencapaian kesejahteraan sosial dan pemanfaatan daya manusia.
- c. Meningkatkan kemakmuran mesjid, meunasah dan mushalla disamping penyempurnaan dan perluasan tempat-tempat peribadatan lainnya.
- d. Menggali dan menjaga nilai-nilai murni agama Islam untuk menunjang pembangunan sehingga tercapai keseimbangan antara kesejahteraan lahir dan batin dalam kehidupan manusia.

2. Pendidikan

Sektor ini akan mendapat prioritas tinggi dalam Pelita IV, berkaitan dengan program umum pemerintah dalam rangka pembangunan sumber daya manusia.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan pokok dalam sektor ini adalah :

1. Melaksanakan kewajiban belajar tingkat pendidikan dasar untuk anak usia sekolah (7 – 12 tahun).
2. Melaksanakan proses integrasi kurikulum Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar, dalam pemantapan dasar pembinaan sumber daya manusia.
3. Merealisasikan secara intensif pengajaran bahasa Indonesia pada tingkat pendidikan dasar.
4. Memperluas pendidikan kejuruan pada tingkat SMTP dan SMTA yang dapat menunjang kebutuhan pembangunan di samping peningkatan kualitas pendidikan kejuruan yang telah ada.
5. Mempertinggi mutu pendidikan umum dan pendidikan agama Islam sekolah-sekolah dasar tingkat SMTP dan SMTA dalam upaya mencapai kualitas yang lebih baik.
6. Meningkatkan usaha-usaha pembinaan anak-anak yang berprestasi melalui penyediaan beasiswa dari sumber yang ada dan sumber-sumber lainnya.
7. Mengaktifkan pembinaan dayah-dayah yang ada dalam usaha pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan.
8. Memasyarakatkan olah raga melalui jalur pendidikan dalam rangka pembinaan kesehatan jasmani dan rohani bagi pengembangan generasi muda dengan mengadakan sarana dan fasilitas olah raga yang memadai.
9. Menyempurnakan sarana dan fasilitas perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum yang lebih merata.
10. Mengembangkan program pendidikan luar sekolah untuk menampung dan membina ketrampilan anak-anak putus sekolah dalam rangka mengembangkan jiwa berwiraswasta.
11. Mengadakan sekolah kejuruan tingkat akademi seperti politeknik dan pembinaan jurusan kimia dan mesin pada Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja bagi pembangunan industri.
12. Mengembangkan dan meningkatkan mutu akademis fakultas-fakultas yang ada pada perguruan tinggi di daerah ini, dalam rangka mendukung perkembangan baik ditingkat menengah maupun akademi.

13. Membina dan meningkatkan daya tampung kampus perguruan tinggi di Darussalam dan kampus-kampus lainnya di daerah, sehingga berfungsi sebagai pusat-pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat menunjang pembangunan daerah dan nasional.

3. Kebudayaan

Hal-hal yang akan dijalankan dalam sektor kebudayaan adalah :

- a. Menggali nilai-nilai apresiasi seni budaya daerah dengan mendorong kegiatan seni budaya yang terdapat dalam masyarakat untuk menunjang pembangunan.
- b. Membina seni budaya tradisional daerah untuk pengembangan kebudayaan nasional.
- c. Membina taman budaya, permusiuman dan kepurbakalaan dalam rangka pelestarian daerah, di samping untuk menggiatkan objek pariwisata.
- d. Mengaktifkan Dewan Kesenian Aceh untuk menggali, memupuk dan mengembangkan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional.
- e. Mengusahakan terselenggaranya Pekan Kebudayaan Aceh sekali dalam lima tahun.

4. Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian

Langkah-langkah kebijaksanaan dalam sektor ini adalah :

- a. Mengarahkan Ilmu pengetahuan pada penciptaan teknologi dan inovasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat, terutama untuk meningkatkan keterpaduan antara kegiatan pertanian dan industri.
- b. Menciptakan iklim yang merangsang dan menggairahkan penelitian secara terpadu dan sesuai dengan sasaran pokok (basic objective) yang disusun bersama antara lembaga yang bersangkutan.
- c. Mengusahakan penelitian ilmu natura dan penelitian ilmu sosial yang lebih seimbang dan lebih mengarah kepada penelitian terpadu yang dapat membuka tabir pemanfaatan alih teknologi, dan menggerakkan potensi sosio-kultural yang ada menjadi kegiatan-kegiatan operasional dalam pembangunan.
- d. Melaksanakan penelitian tentang teknologi lepas panen serta hambatan dalam pengembangan industri rumah tangga di pedesaan.
- e. Menerapkan teknologi tepat guna untuk dapat menunjang peningkatan

- produksi, kesempatan kerja dan pemerataan hasil pembangunan.
- f. Menseimbangkan penerapan teknologi antara desa dan kota, sehingga kesenjangan dapat diperkecil.

5. Kesehatan

Sasaran-sasaran pokok sektor kesehatan adalah :

- a. Mempertinggi taraf kesehatan masyarakat, dengan cara meningkatkan mutu gizi, terutama diarahkan kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah baik di desa maupun di kota, dan memberikan perhatian khusus kepada terpencil dan daerah-daerah pemukiman baru.
- b. Memperbaiki kesehatan masyarakat dengan pencegahan dan penyembuhan melalui peningkatan.
 - Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.
 - Pemberantasan penyakit menular.
 - Kebersihan lingkungan.
 - Pengawasan obat-obatan, makanan dan minum-minuman yang tidak memenuhi syarat.
 - Penyuluhan kesehatan kepada masyarakat serta meningkatkan dan memperluas Usaha Kesehatan Sekolah.
 - Kesehatan lingkungan yang meliputi sarana air bersih jamban keluarga dan sanitasi.
- c. Melanjutkan usaha mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan pembangunan Puskesmas-Puskesmas pembantu, Balai-balai pengobatan serta perbaikan dan peningkatan rumah-rumah sakit kabupaten dan kotamadya. Disamping itu akan ditempatkan tenaga-tenaga medis dan para medis pada puskesmas-puskesmas yang belum ada tenaga tersebut.

6. Kependudukan dan Keluarga Berencana

Dalam bidang kependudukan dan keluarga berencana, langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- a. Kebijakan kependudukan yang menyeluruh dan terpadu perlu dilanjutkan dan ditingkatkan serta diarahkan untuk menunjang taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pemerataan kesejahteraan masyarakat dan taraf hidup masyarakat terutama bagi masyarakat yang terpencil dilaksanakan dengan cara pemukiman kembali, sehingga dengan demikian masyarakat tersebut akan da-

pat menikmati fasilitas-fasilitas yang disediakan pemerintah.

- c. Pelaksanaan kebijaksanaan kependudukan antara lain melalui pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian dan penyebaran penduduk serta tenaga kerja yang lebih merata dan lebih serasi.
- d. Program keluarga berencana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga bahagia yang menjiwai dasar bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.
- e. Pelaksanaan keluarga berencana secara meluas dilakukan melalui penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana.
- f. Penataran penyuluhan tentang teknik keluarga berencana perlu ditingkatkan kepada tokoh-tokoh masyarakat organisasi massa dan lain-lain.
- g. Pemerataan penyebaran klinik keluarga berencana dan pospos KB desa untuk meningkatkan pelayanan, sehingga terjangkau oleh masyarakat luas.

7. Perumahan dan Pemukiman.

Prinsip-prinsip pembangunan di sektor ini adalah

- a. Pembangunan perumahan rakyat yang harganya dapat dijangkau oleh golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah.
- b. Dorongan atau bantuan kepada usaha swasta dan koperasi yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan, baik yang berhubungan dengan penyuluhan teknik pembangunan perumahan maupun penyediaan kredit yang memadai.
- c. Pemugaran perumahan rakyat dan perbaikan kampung yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, terutama untuk mendorong dan membina peranan, kemampuan dan prakarsa masyarakat sendiri untuk ikut serta dalam pembangunan permukiman.
- d. Penyuluhan tentang lingkungan permukiman yang bersih dan sehat termasuk pengembangan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan.
- e. Peningkatan penyediaan air bersih serta pemerataannya untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan.
- f. Pelaksanaan studi kelayakan tentang kemungkinan pembangunan dan selanjutnya pelaksanaan pembangunan pemukiman karyawan industri dan penduduk di kawasan industri Aceh Utara dengan mengikuti sistem yang lebih terpadu (multiple nuclei system) sejalan dengan usaha pembauran

sosial masyarakat.

8. Kesejahteraan Sosial dan Peranan Wanita

Dalam sektor ini kebijaksanaan diarahkan untuk :

- a. Meningkatkan usaha-usaha pelayanan dan bimbingan terhadap tuna sejahtera, seperti anak yatim, orang cacat, orang lanjut usia, orang terlantar dan pengemis dengan menunjang pembangunan dan pengelolaan rumah penyantun serta pusat layanan dan bimbingan sosial lainnya.
- b. Memperbesar kemampuan layanan dan bimbingan serta mutu rumah penyantun yang ada, dengan usaha-usaha pendidikan dan latihan-latihan ketrampilan.
- c. Menggiatkan usaha-usaha pencegahan eksploitasi anak-anak dan wanita baik dalam bidang-bidang perburuhan maupun dalam bidang sosial lainnya.

9. Generasi Muda

1. Generasi muda adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan. Oleh karena itu perlu ditingkatkan upaya pembinaan dan pengembangan generasi muda secara terus menerus dalam kerangka pendidikan nasional. Pembinaan dan pengembangan generasi muda menuntut partisipasi dan tanggung jawab semua pihak dan untuk itu perlu ditingkatkan kebijaksanaan yang serasi, tentang keterpaduan dalam pembinaan dan pengembangan secara menyeluruh.
2. Pembinaan dan pengembangan generasi muda mempunyai tujuan untuk mewujudkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional serta daerah, dan dilaksanakan melalui usaha-usaha peningkatan ketakwa-an kepada Allah Yang Maha Kuasa, menanam dan menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, mempertebal idealisme, semangat patriotisme dan harga diri, memperkuat kepribadian dan disiplin, serta mendorong partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Pengembangan wadah-wadah pembinaan generasi muda perlu ditingkatkan secara terarah dan teratur. Untuk itu selalu dipelihara suasana yang sehat agar kreativitas dan tanggung jawab semakin berkembang serta diusahakan bertambahnya fasilitas dan sarana yang memungkinkan peningkatan dan pengembangan kegiatan generasi muda.

10. Peranan Wanita

Meningkatkan usaha-usaha pengembangan pendidikan kesejahteraan keluarga (PKK) di desa-desa untuk menyalurkan kegiatan wanita dalam rangka menun-

jang pembangunan dan pelayanan kesejahteraan sosial.

POLITIK, APARATUR PEMERINTAH, HUKUM, PENERANGAN DAN MEDIA MASSA.

1. Politik

Politik sebagai suatu supra-struktur dalam pembangunan perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, dalam hal ini langkah-langkah kebijaksanaan adalah :

- a. Meningkatkan stabilitas politik yang lebih mantap untuk mewujudkan Demokrasi Pancasila.
- b. Memantapkan politik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mempertinggi dan memperluas usaha-usaha memasyarakatkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang dilakukan melalui pendidikan, penataran, dan usaha-usaha lainnya di seluruh lapisan masyarakat.
- c. Meningkatkan kesadaran berpolitik bagi masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 untuk menunjang pembangunan melalui pendidikan politik serta usaha-usaha lainnya kepada seluruh lapisan masyarakat.
- d. Memperkuat peranan kekuatan sosial politik, khususnya partai politik dan golongan karya, dalam membina kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional dan daerah. Untuk itu perlu ditingkatkan peranannya dalam melaksanakan pendidikan politik serta dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berorientasi kepada program-program pembangunan secara jujur, sehat dan bertanggung jawab demi tercapainya tujuan nasional.

2. Aparatur Pemerintah.

Aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijaksanaan negara harus secara terus-menerus mendapatkan pembinaan-pembinaan. Arah kebijaksanaan yang akan ditempuh adalah :

- a. Meneruskan usaha peningkatan pengabdian dan kesetiaan aparatur pemerintah kepada cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.
- b. Melanjutkan pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur pemerintah agar dapat merupakan alat pemerintah pusat dan daerah yang jujur,

terampil, berwibawa, dan penuh dedikasi dalam menjalankan tugasnya.

- c. Meningkatkan kemampuan aparaturnya pemerintah agar dapat menghayati aspirasi-aspirasi masyarakat dan mampu memasyarakatkan kebijaksanaan pembangunan dalam rangka usaha menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

3. H u k u m.

Pembinaan tertib hukum mempunyai arti tersendiri dalam Pelita IV. Hal ini berkaitan dengan program Kabinet Pembangunan IV untuk melahirkan suatu pemerintahan yang bersih. Dalam hal ini program-program yang akan dikembangkan adalah :

- a. Meneruskan pembinaan hukum nasional dan peraturan-peraturan daerah dalam bidang-bidang tertentu.
- b. Meneruskan penertiban badan-badan penegak hukum agar sesuai dengan fungsi dan wewenangnya.
- c. Meningkatkan pembinaan sikap, kemampuan dan kewibawaan aparaturnya penegak hukum agar dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga terjamin tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.
- d. Mempercepat usaha-usaha pelayanan dan bantuan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.
- e. Memupuk kesadaran hukum anggota masyarakat agar dapat mengerti dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara.

4. Penerangan dan Media Massa

Kebijaksanaan di sektor ini adalah :

- a. Meningkatkan kegiatan penerangan sampai ke pelosok-pelosok desa dengan jalan memanfaatkan seoptimal mungkin semua media yang ada seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, film, kesenian rakyat, kontak pribadi dan sebagainya.
- b. Meningkatkan peranan media massa serta kualitas dan kuantitas petugas penerangan dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan.
- c. Memperluas jangkauan penerimaan siaran televisi, sehingga dapat mencapai masyarakat yang lebih luas.
- d. Meningkatkan sarana dan teknologi percetakan, sejalan dengan perkembangan pembangunan diberbagai bidang.

KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Sebagaimana halnya dengan politik, masalah keamanan dan ketertiban juga merupakan unsur penunjang dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu kedua hal ini perlu penanganan yang sungguh-sungguh, demi kepentingan masyarakat pada umumnya. Prinsip-prinsip yang perlu dikembangkan adalah :

1. Keamanan dan ketertiban merupakan salah satu syarat untuk dapat berlangsungnya usaha-usaha pembangunan dengan sebaik-baiknya, sehingga keamanan dan ketertiban bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas keamanan, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat.
2. Usaha-usaha pemantapan ketertiban dan keamanan yang telah ada untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan terus ditingkatkan.
3. Pembinaan mental masyarakat dalam rangka pembinaan ketertiban dan keamanan.
4. Pembinaan kesatuan bangsa bagi kelompok masyarakat yang loyalitas terhadap bangsa dan negara masih labil dan secara kebetulan menguasai ekonomi daerah.
5. Peningkatan dan penggalakan peran serta masyarakat dalam membantu tugas-tugas aparat ketertiban dan keamanan di daerah dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketertiban dan keamanan.

F. STRATEGI PEMBIAYAAN

Masalah pembiayaan pembangunan di masa datang akan merupakan persoalan yang relatif sulit. Keadaan ini adalah sebagai akibat dampak resesi ekonomi dunia. Berhubung dengan itu kebijaksanaan pembiayaan pembangunan akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembangunan dalam Pelita IV yang ditujukan kearah peningkatan kesejahteraan materiil dan spiritual, peningkatan sumber daya manusia dan alam, dan keseimbangan pembangunan antar wilayah memerlukan tersedianya pembiayaan pembangunan yang cukup besar. Oleh karena itu perlu diusahakan peningkatan dan perluasan penerimaan pembangunan dari sumber-sumber penerimaan baru, baik yang berasal dari sektor pemerintah, swasta, koperasi, masyarakat maupun sumber-sumber lain yang memungkinkan.
2. Kebijakan perpajakan dan penggalan sumber-sumber pendapatan daerah diarahkan kepada intensifikasi masing-masing jenis pungutan dan perluasan jenis pungutan pajak dan retribusi daerah berdasarkan pemerataan beban dan progresivitas.
3. Kebijakan mengenai Perusahaan Daerah dan Bank Pembangunan Daerah diarahkan kepada pemantapan dalam penyediaan dana untuk pembangunan

daerah.

4. Perjuangan agar proyek-proyek daerah, disamping proyek-proyek sektoral, dapat dibiayai dengan dana APBN.
5. Sumber pembiayaan sektora swasta dan koperasi yang berasal dari tabungan masyarakat dan fasilitas kredit perbankan diarahkan untuk membiayai sektor-sektor usaha yang mendapat prioritas utama dan cepat menghasilkan. Untuk itu peranan sektor swasta dan koperasi perlu ditingkatkan, sehingga potensi permodalan dalam masyarakat dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya, untuk tujuan-tujuan pembangunan.
6. Pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan dengan efektif dan efisien dengan memperhatikan prioritas dan strategi pembangunan.
7. Peningkatan peranan dan fungsi pengawasan untuk menghindari kebocoran dalam penerimaan dan pengeluaran biaya pembangunan.

BAB IV

P E N U T U P

Pola Umum Pembangunan Lima Tahun IV Propinsi Daerah Istimewa Aceh ini dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh dengan mendengar dan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran-saran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I dalam menyusun Repelita IV Daerah yang merupakan rencana pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan di berbagai bidang dan sektor dalam tahun 1984 – 1989.

Program pelaksanaan serta usaha pembangunan untuk setiap tahun dituangkan dalam rencana operasional tahunan daerah yang akan dibiayai baik oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I, Sektoral, dan Program-program Inpres maupun oleh program-program lainnya.

A. PELAKSANAAN

1. Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun IV Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Tiap lima tahun sekali Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh akan ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan rakyat.
3. Mengingat bahwa pembangunan daerah adalah bahagian dari pembangunan na-

sional maka dalam penyusunan Repelita IV Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh diusahakan supaya dapat terlibat hubungan tersebut dalam kebijaksanaan masing-masing sektor dan program-program pembangunan.

B. PERSYARATAN

Keberhasilan usaha-usaha pembangunan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh sangat bergantung pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin para pelaksana baik aparat pusat maupun aparat daerah serta peran serta seluruh lapisan masyarakat.

Hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan bathin.

www.jdih.acehprov.go.id